

SELAYANG PANDANG

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb



engan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah tulisan singkat tentang Kantor Kementerian Agama Kota Batam Tahun 2018 dalam bentuk buku yang berjudul Selayang Pandang Kantor Kementerian Agama Kota Batam Tahun 2018 dapat diselesaikan Tim Penyusun.

Buku Selayang Pandang Kantor Kementerian Agama Kota Batam Tahun 2018 berusaha memperkenalkan secara umum informasi tentang organisasi , program serta tugas pokok dan Fungsinya.

Tim penyusun telah berusaha untuk membuat yang terbaik. Namun apabila masih jauh dari kesempurnaan, kritik serta sumbang saran yang sifatnya membangun kami terima dengan sikap terbuka.

Akhirnya, buku kecil selayang pandang ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca dan membutuhkan data – data keagamaan di Kota Batam.

Terima kasih dan Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Batam, Februari 2018

Tim Penyusun



Lukman Hakim Syaifuddin
Menteri Agama RI



Marwin Jamal
Ka. Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau

VISI & MISI
KEMENTERIAN AGAMA RI
(KMA Nomor 39 Tahun 2015)

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, dan SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MISI

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan Ibadan haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

NILAI BUDAYA KERJA
KEMENTERIAN AGAMA RI

1. **INTEGRITAS**
Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar.
2. **PROFESIONALITAS**
Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
3. **INOVASI**
Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. **BERTANGGUNGJAWAB**
Bekerja secara tuntas dan konsekuen
5. **KETELADAN**
Menjadi contoh yang baik bagi orang lain





Erizal Abdullah
Ka. Kantor Kementerian Agama
Kota Batam

Kata Sambutan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam

Assalamu Alaikum Wr. Wb



Ihamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, zat yang Maha Kuasa dengan segala kekuasaan-NYA, zat yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari sifat lemah semua mahluk-Nya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanahkan untuk selalu transparan dalam menyampaikan berbagai informasi, khususnya yang berkaitan dengan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam. untuk itu, saya menyambut baik atas terbitnya buku selayang pandang Kantor Kementerian Agama Kota Batam 2018 yang berisi tentang Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam, KUA dan Madrasah dan rumah ibadat untuk diperkenalkan kembali kepada public, dengan harapan dapat memberikan manfaat, informasi, evaluasi, dan sebagai pertanggungjawaban akan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Akhirnya, saya mengharapkan buku kecil selayang pandang 2018 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada kita semua, terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Batam, Februari 2018
Kepala

Dr. H. ERIZAL, MH
NIP. 196912311995031002

Sekilas

Tentang Kotamadya Batam

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam



yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).

Kota Batam terbentuk berdasarkan Undang – undang No. 53 Tahun 1999 dengan batas wilayah sebagai berikut :

Utara	: Selat Singapore
Selatan	: Kecamatan Senayang
Barat	: Kec. Karimun dan Moro Kab. Karimun
Timur	: Kec. Bintan Utara

Georafis yang strategis dan dengan potensi alam menjadi Kota Batam sebagai Kota pusat perekonomian di masa depan. Kota Batam terdiri dari 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan:

1. Kec. Batu Ampar dengan 4 Kel/ kelurahan
2. Kec. Lubuk Baja dengan 5 Kel/ kelurahan
3. Kec. Nongsa dengan 4 Kel/ kelurahan
4. Kec. Sekupang dengan 7 Kel/ kelurahan
5. Kec. Sei. Beduk dengan 4 Kel/ kelurahan
6. Kec. Belakang Padang dengan 6 Kel/ kelurahan
7. Kec. Galang dengan 8 Kel/ kelurahan
8. Kec. Bulang dengan 6 Kel/ kelurahan
9. Kec. Bengkong dengan 4 Kel/ kelurahan
10. Kec. Batu Aji dengan 4 Kel/ kelurahan
11. Kec. Sagulung dengan 6 Kel/ kelurahan
12. Kec. Batam Kota dengan 6 Kel/ kelurahan

Walikota Batam periode awal sampai sekarang :



1. Usman Draman menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 1983 – 1989

2. Radja Abdul Aziz menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 1989 – 1999



3. Nazief Soesila Dharma menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 1999 – 2001



4. Nyat Kadir menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 2001 – 2005

5. Manan Sasmita menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 2005 – 1 Maret 2006



6. Ahmad Dahlan menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 1 Maret 2006 – 1 Maret 2018



7. Agussahiman (Plh) menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 1 – 14 Maret 2018

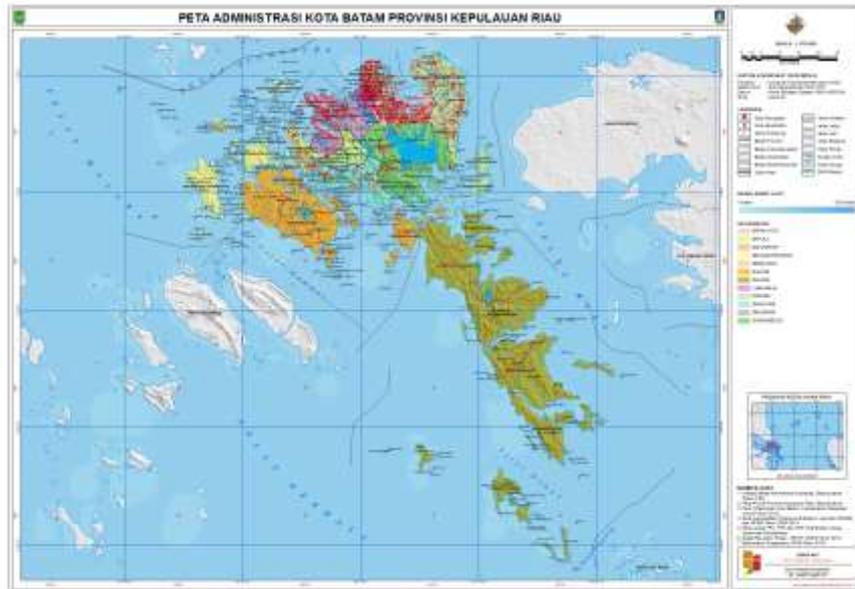


8. Muhammad Rudi menjabat sebagai Walikota Batam pada periode tahun 14 Maret 2018 – sekarang



Sejarah Kota Batam

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru yang bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat Administratif yang kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya. Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literature sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih



merupakan Kerajaan Melayu. Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagai Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau Taklukannya. Atas Dasar peristiwa sejarah tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Batam melalui Peraturan Daerah



Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada tanggal 18 Desember 2015 akan berumur 186 tahun. Luas wilayah Kotamadya Batam pada waktu itu lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km² dan daratan 612,53 Km², sedangkan banyaknya pulau yang berada pada wilayah Kotamadya Batam pada waktu itu berjumlah 186 pulau dimana 80 pulau telah dihuni dan 106 pulau lagi masih kosong,

diantaranya ada 3 pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km², Pulau Bulan dan Kepala Jeri. Karena wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur

pelayaran international yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km)



dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/ keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI (program Pemerintah saat itu), maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Guna pemantapan pengembangan

sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, pergudangan dan basis logistic serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodesasi Pimpinan/ Pengembangan Otorita Batam sebagaiberikut:

1. Tahun 1969–1975

Adalah periode persiapan dan permulaan pengembangan, pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan ketua Otorita Batam DR. IBNU SUTOWO, diantara periode tersebut telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain:



a. Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam. b. Kepres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden. c. Kepres No. 41 tahun 1973 tanggal 22 November 1973; Tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri.

Sejarah Ringkas

Batam Dalam Data 2015 3

Pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded Ware House.

2. Tahun 1975–1978

Adalah periode konsolidasi dimana dalam periode ini dititikberatkan untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina, dengan ketua Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin. Dalam periode ini telah keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut: a. Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah. b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam. c. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat

Keputusan Menteri Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan Oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. d. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam. e. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah Bonded Ware House.



3. Tahun 1978–1983

Yaitu periode pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. B.J. Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain: a. Kepres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof. DR. Ing. B. J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana. b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian. c. Keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No.70/KP/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi. d. KEPRES No. 15 tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

4. Tahun 1983 sampai sekarang merupakan periode penanaman modal dan industri serta pengembangannya.

Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana- prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan periodisasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah "KOTAMADYA BATAM" berdasarkan PP No. 34 tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan

Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu: Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal; 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KEPRES No. 7 tahun 1984 tentang: hubungan kerja antara Kota-madya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES No. 7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut:

Pasal 2, menyebutkan: Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Pasal 3 huruf F, menyebutkan: Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984-1989. Pada Oktober tahun 1989 ditunjuk Walikota Madya Batam yang kedua Drs. R. A. Aziz yang menjabat sampai dengan tahun 1999.

-Tahun 1992

Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115 % dari luas Singapura).

-Tahun 1998

Tahun ini merupakan periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth Abdullah.

-Tahun 1999 (Otonomi Daerah)

Implementasi Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2000, maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai kewenangan terhadap 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- **Tahun 2007** (Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).

Sejak diterbitkan UU 44 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, era baru dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi makin bebas dan terbuka. Implementasi UU ini melalui PP 46 tahun 2007 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.. Dengan dijadikannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diharapkan dapat meningkatkan investasi, menambah keunggulan kompetitif produk ekspor, peningkatan penerimaan devisa, membuka lapangan kerja serta mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batam.

Kantor Kementerian Agama Kota Batam



Kantor Kementerian Agama Kota Batam resmi didirikan pada tahun 1987, melalui KMA No. 137 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Administratif Batam, yang pada saat berdirinya berdomisili di Kelurahan Sekupang Kecamatan Batam Barat Kotamadya Administratif Batam. Setelah terjadi pemekaran Kota Batam, domisili Kantor Kementerian Agama Kota Batam berada di wilayah

Kelurahan Sei. Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Status Kantor Kementerian Agama Kota Batam juga berubah melalui KMA 373 Tahun 2002 dengan Tipologi II-I. Sejarah pembentukan Kementerian Agama Kota Batam, tidak terlepas dari latar belakang sejarah pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Sejak tahun 1987, Kantor Depag Kotamadya Batam (sebelum tahun 2010), masih menginduk kepada Kanwil Kemenag Provinsi Riau di Pekanbaru. Namun sejak tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau, maka Kemenag Kota Batam menjadi salah satu unit kerja dari Kanwil Kemenag Provinsi Kepri.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam telah mengalami 5 kali masa kepemimpinan :

- ❖ Drs.H. Fauzi Mahbub.MM periode 1988 s.d 1998
- ❖ Drs.H. Abd. Razak.Z.MM periode 1998 s.d 2003
- ❖ Drs.H. Khudri Syam periode 2003 s.d 2009
- ❖ Drs.H. Zulkifli Aka, M.Si periode 2009 s.d 2017
- ❖ Dr. H. Erizal, MH periode Oktober 2017 s.d sekarang



Drs.H. Fauzi Mahbub.MM



Drs.H. Abd. Razak.Z.MM



Drs.H. Khudri Syam



Drs.H. Zulkifli Aka, M.Si



Dr. H. Erizal, MH

VISI DAN MISI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM**Visi :**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA BATAM YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BATAM BANDAR DUNIA MADANI BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beraga;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dan potensi ekonomi keagamaan;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum yang berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan terpercaya.

PENDUKUNG KINERJA :**. 1. Nilai Budaya Kerja :**

- **Integritas**
Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar.
- **Profesional**
Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
- **Inovatif**
Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
- **Tanggung Jawab**
Bekerja secara tuntas dan konsekuen
- **Keteladanan**
Menjadi contoh yang baik bagi orang lain

- 2. Tema Kerja** : Ciptakan image yang sempurna
- 3. Motto Kerja** : Ramah, Amanah, dan Tegas
- 4. Sifat Kerja** : Sungguh-sungguh, Teliti, dan Kreatif
- 5. Motivasi Kerja** : Bekerja adalah ibadah, Ikhlas Beramal



Kantor Kementerian Agama Kota Batam berkedudukan di Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 01 Sekupang, Kota Batam. Saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Batam memiliki 12 satuan kerja yang terdiri dari :

No	KanKemenag	Jumlah Satuan Kerja				Jumlah
		Kantor	MAN	MTsN	MIN	
1	Kota Batam	8	2	2	-	12

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA**

Pasal 325

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (2) huruf e terdiri atas:

1. Subbag Tata Usaha;
2. Seksi Pendidikan Madrasah;
3. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Seksi Urusan Agama Kristen;
7. Penyelenggara Pendidikan Kristen;
8. Penyelenggara Katolik;
9. Penyelenggara Hindu;
10. Penyelenggara Buddha; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326**Subbagian Tata Usaha**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Seksi Pendidikan Madrasah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Seksi Urusan Agama Kristen

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, serta pengelolaan data data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Pasal 327**Penyelenggara Pendidikan Kristen**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan Kristen di bidang pendidikan agama Kristen pada PAUD, dasar, menengah dan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Penyelenggara Katolik

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

Penyelenggara Hindu

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

Penyelenggara Buddha

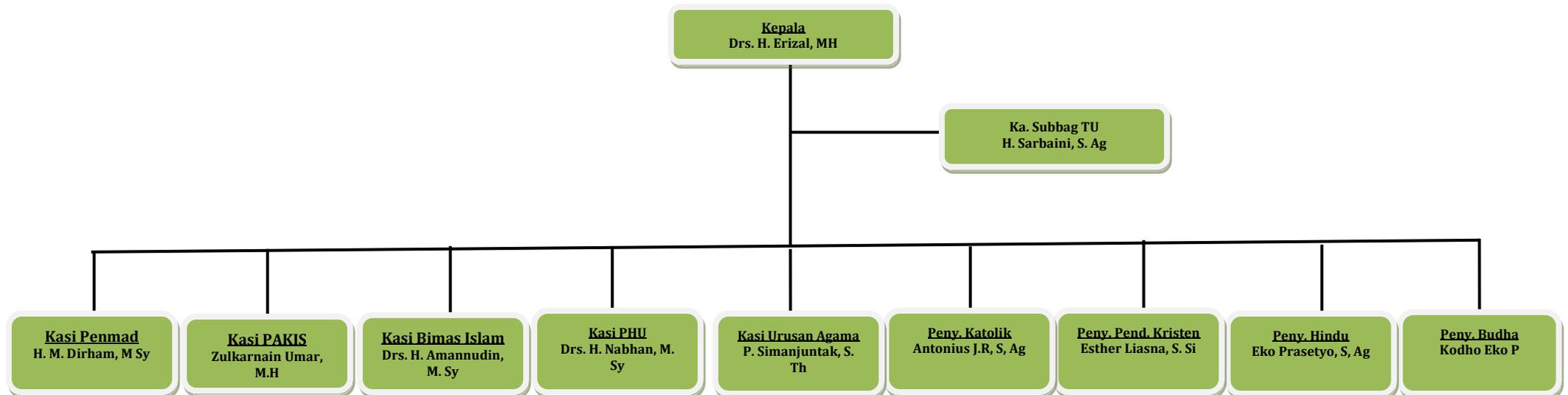
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha.



STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Kementerian Agama Kota Batam

(Berdasarkan PMA RI Nomor 13 Tahun 2012)



PELAYANAN PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

1. TATA USAHA



Pelayanan Publik Bidang Tata Usaha

- Pelayanan Kepegawaian;
- Pelayanan Keuangan;
- Pelayanan Persuratan;
- Pelayanan Barang Milik Negara;
- Pelayanan KUB dan Data;
- Pelayanan Konghucu;
- Laporan Masyarakat;
- Pelayanan Kebersihan dan Keamanan
- Pelayanan Informasi

2. B. ISLAM



Pelayanan Publik Bimas Islam

- > Pelayanan Zakat Dan Wakaf;
- > Pelayanan Kemasjidan;
- > Pelayanan Ormas Islam;
- > Pelayanan Keluarga Sakinah;
- > Pelayanan KUA;
- > Pelayanan Penyuluhan;
- > Pelayanan Pangan Halal;
- > Konsultasi BP4

f kementerianagama | <http://batam.kemmenag.go.id> | 0778-221124

3. PENMAD



Pelayanan Publik Pendidikan Madrasah

- > **Pendirian Lembaga Pendidikan;**
- > **Peningkatan Kompetensi Guru Dan Tenaga Pendidikan;**
- > **Peningkatan Kompetensi Siswa;**
- > **Informasi Data Melalui Emis Dan Simpatika;**
- > **Pelayanan Mutu Akademik/kurikulum;**
- > **Pelayanan Peningkatan Sarpras Madrasah.**

f kemenagbatam <http://batam.kemendag.go.id> 0778-321124

4. PAKIS



Pelayanan Publik Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- > **Pendirian Lembaga Pendidikan TPQ;**
- > **Pendirian Lembaga Pendidikan DTA, DTW, DTU, Ma'ahad;**
- > **Pendirian Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren;**
- > **Pelayanan Guru PAI, SD, SMP, SMA;**
- > **Pelayanan Data Emis Dan Simpatika;**
- > **Pelayanan Pondok Pesantren Salafiah, Ula Dan Wustha.**

f kemenagbatam <http://batam.kemendag.go.id> 0778-321124

5. PHU



Pelayanan Publik Haji dan Umroh

- > Pelayanan Pendaftaran Haji;
- > Pelayanan Pembatalan Haji;
- > Pelayanan Izin Travel Umroh;
- > Rekomendasi Paspor Haji Dan Umroh;
- > Informasi Haji Dan Bimbingan Manasik;

[kemenagbatam](#) <http://batam.kemenag.go.id> 0778-321124

6. URUSAN AGAMA KRISTEN



Pelayanan Publik Bimbingan Masyarakat Kristen

- + Melayani Data, Rumah Ibadah Kristen, Yayasan Kristen Dan Kegiatannya;
- + Melayani Data Kerohanian Asing;
- + Data - data Tokoh Gereja Atau Tokoh Agama Kristen;
- + Data Para Pendeta Se - Batam;
- + Data Lembaga Keagamaan Di Tingkat Kota Batam;
- + Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kota Batam;
- + Pengukuhan Dan Pelantikan Di Instansi Lain Oleh Rohaniawan Kristen;
- + Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Non PNS;
- + Pembinaan Keluarga Bahagia Dan Sejahtera Umat Kristen.

7. PENDIDIKAN KRISTEN



Pelayanan Publik Pendidikan Kristen

- > Pelayanan Simpatika Guru Pak Di Kota Batam;**
- > Data Guru Pak Se-Kota Batam;**
- > Data Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Di Kota Batam;**
- > Data Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen;**
- > Data Tenaga Pendidikan Guru Minggu Se-kota Batam.**

f kemenagbatam <http://batam.kemenag.go.id> 0778-321124

8. PENY. KATOLIK



Pelayanan Publik Penyelenggara Katolik

- Pemberian Tanda Registrasi Gereja Katolik;**
- Registrasi Yayasan Katolik'**
- Melayani Guru Agama Katolik Dan Penyuluh Agama;**
- Pelayanan Data Keagamaan Katolik;**
- Pelayanan Simpatika Bagi Guru Agama Katolik;**
- Pembinaan Siswa Katolik Pada Sekolah Umum.**

f kemenagbatam <http://batam.kemenag.go.id> 0778-321124

9. PENY. HINDU



Pelayanan Publik Penyelenggara Hindu

- Pembinaan Perkawinan/keluarga Sukhinah;
- Permohonan Tanda Daftar Lembaga Agama Dan Pendidikan Keagamaan Hindu;
- Permohonan Bantuan Lembaga Agama Dan Pendidikan Keagamaan Hindu;
- Permohonan Rohaniawan, Penyumpah, Penceramah, Bimbingan Konseling Dll;
- Permohonan Rekomendasi Bantuan;
- Permohonan Piagam Lulus Ujian Dasar Paham Keagamaan Hindu;
- Permohonan Legalisir Piagam Yang Dikeluarkan Kementerian Agama.

f kemenagbatam <http://batam.kemenag.go.id> 0778-321124

10. PENY. BUDHA



Pelayanan Publik Penyelenggara Buddha

- > Penyaluran TPG Guru Agama Buddha;
- > Penerbitan Surat Keterangan Pendataan Rumah Ibadah;
- > Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah Agama Buddha;
- > Pembinaan Kepada Umat Buddha;
- > Melayani Surat-surat Yang Berhubungan Dengan Pola Pembinaan Umat Buddha

f kemenagbatam <http://batam.kemenag.go.id> 0778-321124

DATA – DATA**A. DATA PNS**

PNS Kemenag diluar dpb BP Batam	Pegawai kemenag batam dpk prov kepri	PNS Kemenag dpb BP Batam	TOTAL
271	1	89	361

1

B. DATA KEAGAMAAN

Agama	Penduduk	Rumah Ibadah	Ormas/ Lembaga Agama
ISLAM	757.332	1.259	42
KRISTEN	196.102	456	5
KATOLIK	35.218	23	2
HINDU	749	2	7
BUDHA	71.537	96	
KONGHUCU	200	7	
Jumlah	1.061.138	1.843	

C. DATA LEMBAGA MADRASAH NEGERI

NO	KECAMATAN	MADRASAH				JUMLAH
		MIN	MTSN	MAN	MAN IC	
1	Sekupang					
2	Belakang Padang		1			1
3	Batu Aji					
4	Sagulung	1		1		1
5	Bulang					
6	Sei Beduk					
7	Galang					
8	Batam Kota					
9	Lubuk Baja					
10	Nongsa				1	1
11	Batu Ampar					
12	Bengkong	1	1			2
	TOTAL	2	2	1	1	5

D. DATA LEMABAGA MADRASAH SWASTA

NO	KECAMATAN	MADRASAH SWASTA				JUMLAH
		RA	MIS	MTSS	MAS	
1	Sekupang	13	6	4	4	27
2	Belakang Padang		2	1	1	4
3	Batu Aji	15	1	1		17
4	Sagulung	27	7	2	1	37
5	Bulang		1	2	2	5
6	Sei Beduk	19	2	2	1	24
7	Galang			1		1
8	Batam Kota	22	4	1		27
9	Lubuk Baja	4	1	1		6
10	Nongsa	5	1	2	1	9
11	Batu Ampar	6	3	1	1	11
12	Bengkong	10	4	1	1	16
	TOTAL	121	32	19	12	184

E. DATA HAJI

HAJI		UMRAH	
BERANGKAT		WAITINGLIST	KANTOR PUSAT
2017	2018	SAMPAI DENGAN TAHUN 2031	KANTOR CABANG
640	630	9000	21

F. DATA PONDOK PESANTREN KOTA BATAM

No	Pondok Pesantren			Kecamatan	Jumlah
	Salafiah	Modern	Sekolah berbasis Pondok Pesantren (SMP BP)		
1	PPS Wustha Darul Falah	PP Walisongo	PP Al-Kausar Batam	Nongsa	6
		PP Manbaul Hidayah	PP Al-I'tishom		
		PP Darul Falah			
2	PPS An-Shorussunah		PP Badariyyah	Batam Kota	3
	PPS Tahfis Wal Lughoh Ruhul Qur'an				
3	PPS Ula Imam Syafi'i	PP An-Nikmah		Sagulung	5
	PPS Usman Bin Afan				
	PPS Wustho An-Nikmah	PP AL-Ukhuwah			
4	PPS Al-Fatah	PP Bina Umah	PP Nurul Haq	Batu Aji	5
	PPS Sekolah Tahfis Qur'an Anak Soleh Kepri		PP Hidayatullah		
5	PPS Tahfis Yanbu'ul Qur'an	PP Raudhatul Qur'an		Sei Beduk	5
	PPS Mudi Madani	PP Al-Pancori NW			
	PPS Sirul Ilahiyah				
6	PPS Jamiatul Ulum Arrahman	PP Ya-Husnaya		Sekupang	6
	PPS Syamsul Huda	PP Az-zainiyah			
	PPS Al-Amani	PP At-Tamadun			
7	PPS Ar-Rabbani			Bengkong	1
8		PPS Miftakhul Huda		Galang	1
TOTAL					32

CAPAIAN PROGRAM

Kantor Kementerian agama Kota Batam telah menetapkan program – program berkualitas dan telah mencapai hasil- hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Batam. Capaian tersebut diantaranya :

1. Adanya pelayanan Kementerian Agama di Mall pelayanan Public Kota Batam yakni berupa pelayanan :

- a. PHU
- b. Bimas Islam
- c. Pelayanan KUA
- d. Dan Informasi Lainnya terkait Kementerian Agama.



2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah daerah Kota Batam dan BP

Kawasa
n Batam



3. Menciptakan Kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan dinamis, hidup berdampingan antara satu sama lainnya dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta secara bersama sama menyatakan sikap menolak RAdikalisme, Terorisme, Narkoba, Berita HOAX dan LGBT di Kota Batam dalam rangka mewujudkan “Batam Bandar Dunia Madani”.



- Mendorong daya saing madrasah baik RA, MI, MTs dan MA untuk berkompetisi dalam bidang pendidikan.

Sekolah SMA/MA "PROGRAM IPS PERINGKAT 10 BESAR SE-KEPRI"

SMA/MA PROGRAM IPS YANG MEMPEROLEH PERINGKAT 10 BESAR UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
No	SMA/MA SEKOLAH	JUMLAH PESERTA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	SMA MAURENYAWA BATAM	23	76,87	1
2	SMA YOS SUDARSO BATAM	136	76,53	2
3	SMA MONDIAL BATAM	50	73,71	3
4	MA USB PILANG, BAW BATAM	75	73,82	4
5	SMA NEGERI 3 BATAM	67	72,70	5
6	SMA GLOBAL INDONESIA BATAM	9	71,83	6
7	SMA NEGERI 1 BATAM	167	71,66	7
8	SMA KRISTEN BASIC BATAM	17	71,36	8
9	SMA ARRAH BODHI KARIMUN	67	70,31	9
10	SMA KALLISTA BATAM	6	68,90	10



(Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepri)

Lampiran*1. KEDUDUKAN KANTOR**

NAMA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
 TIPOLOGI : II-I
 ALAMAT : Jl. Masjid Raya Baiturrahman No. 1, Sei Harapan, Sekupang, Batam
 TELEPON : (62-778) 321124
 FAX : (62-778) 327713
 WEBSITE : www.batam.kemenag.go.id
 EMAIL : kemenagkotabatam@kemenag.go.id

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEJABAT	NIP
1	Kepala Kantor Kemenag Kota Batam	Dr. H. Erizal, MH	196912311995031002
2	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	H. Sarbaini, S.Ag	19630912 199203 1 005
3	Kepala Seksi Bimas Islam	Drs. H. Muhammad Amanuddin	19641003 199303 1 003
4	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU)	Drs. H.Nabhan	19610131 199303 1 001
5	Kepala Seksi Pend.Agama & Keagamaan Islam (PAKIS)	H. Zulkarnain, S.Ag. M.H.	19711010 200212 1 004
6	Kepala Seksi Pend. Madrasah	H. Muhammad Dirham, S.Ag	19720717 199903 1 001
7	Kepala Seksi Bimas Kristen	Pargaulan Simanjuntak, S.Th	19670917 200604 1001
8	Penyelenggara Bimas Budha	Kodho Eko Prayoga, S.Ag.	19810121 200801 1 010
9	Penyelenggara Bimas Katholik	Antonius Januaris Retutola, S.Ag.	19630717 200003 1 002
10	Penyelenggara Bimas Hindu	Eko Prasetyo, S.Ag.	19830715 200801 1 005
11	Penyelenggara Pend.Kristen	Esther Sri Liasna, S.Si	19710817200501 2 005

12	Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar	H.Syafri AS, S.Ag.	19600801 199503 1 001
13	Kepala KUA Kecamatan Lubuk Baja	Zainal Arifin, S.Ag.	19760619 200312 1 001
14	Kepala KUA Kecamatan Nongsa	Budi Dermawan, S.Ag.	19760729 200212 1 003
15	Kepala KUA Kecamatan Bengkong	Unggul Pahmi Hasibuan,S.Ag.	19700828 199803 1 004
16	Kepala KUA Kecamatan Batu Aji	H.Suardi, S.Ag.	19690503 199703 1 001
17	Kepala KUA Kecamatan Sekupang	H.Hamizar,S.Sos.I	19770515 200501 1 007
18	Kepala KUA Kecamatan Sagulung	H. Hamdanis, S.Ag.	19741127 200212 1 002
19	Kepala KUA Kecamatan Bulang	H.Adamrin, S.Ag.	19741117 200801 1007
20	Kepala KUA Kec. Belakang Padang	Masnur , S.Ag,MHI	19760326 200501 1 004
21	Plt Kepala KUA Kecamatan Batam Kota	Masnur , S.Ag,MHI	19760326 200501 1 004
22	Kepala KUA Kecamatan Galang	Rudiansyah, S.H.I	19790930 200604 1001
23	Plt Kepala KUA Kecamatan Sei Beduk	H.Adamrin, S.Ag.	19741117 200801 1007
24	Kepala MAN Batam	Dra. Khairina	19670722 199303 2 004
25	Kepala MTsN Batam	Rudy hartono. S.Ag	19770110 200501 1 008
26	Kepala MTsN Belakang Padang	Hj. Nurainun, S.PdI	19600606 198603 2 001
27	Kepala MIN Batam	Irma Suryani. S.Ag	19731013 199803 2 001
28	Kepala MIN Sagulung	Zakirman. S.Pd.I	19690105 199203 1 004

ALAMAT KUA SE KOTA BATAM

1. Batu Ampar
Jl.Kuda Laut No.1
(0778)450917
2. Lubuk Baja
Belakang Perum.Batu Batam Permai
082173616456
3. Nongsa
Jl.Hangkesturi No.7 Nongsa
081364659570
4. Sekupang
Jl.Pramuka No.1
(0778)327526
5. Sei Beduk
Jl.S.Parman Bida Ayu Pintu II
0811693682
6. Bel. Padang
Jl.Hang Lekiu No.21 Kel. Tanjung Sari, Kec. Bel. Padang
(0778)312213, HP. 081270090230
7. Galang
Jl.Batin Limat no.2 Sembulang
81372710022
8. Bulang
Bulang Lintang
081364788374
9. Bengkong
Jl.Tuah Sakti No.1 Kel.Sadai
082173640559
10. Batam Kota
Komp.Perum Cendana, Batam Centre
(0778) 475468, HP. 0811 698 655
11. Sagulung
Jl.R.Soepipto No.1 Sagulung
(0778) 700 2273 , HP. 081364100749
12. Batu Aji
Jl.Soepipto MKGR Batuaji 081364310943

PROGRAM STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima;
5. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
6. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan Dasar - Menengah (Wajib belajar 12 tahun)
7. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan;
8. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar - Menengah (Wajib belajar 12 tahun);
9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
10. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas;
11. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas;
12. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional diseluruh satuan pendidikan;